

Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Venny Tria Vanesha*; Selamat Rahmadi; Parmadi

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

**E-mail korespondensi: vennytriav@gmail.com*

Abstrak

This study aims to analyze the development of Local Own-Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Spesific Allocation Fund (DAK), and capital expenditure as well as the influence of PAD, DAU and DAK on capital expenditure in districts/cities in Jambi Province. Data is sourced from the Directorate-General of Regional Fiscal Balance, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Data were analyzed using panel data regression models. The results of the study found that simultaneously PAD, DAU, DAK had a significant effect on capital expenditure. However, only partially the DAU influences the capital expenditure of districts/ cities in Jambi Province.

Keywords: PAD, DAU, DAK, Capital expenditures

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Data bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dianalisis dengan menggunakan model regresi data panel. Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan PAD, DAU, DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun demikian, secara parsial hanya DAU yang berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Kata Kunci: PAD, DAU, DAK, Belanja modal

PENDAHULUAN

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Pengelolaan keuangan dalam APBD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Salah satu bagian dari belanja daerah yaitu belanja modal (Abdullah dan Riza, 2014).

Belanja modal adalah merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Pengeluaran Anggaran dari Belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran (PP No.71 Tahun 2010). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja modal untuk menambah aset tetap.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja modal sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pengadaan / pembelian aset yang bermanfaat dimana dapat meningkatkan kemampuan suatu kegiatan investasi.

Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap belanja modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber kepada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan dari pemerintah adalah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berupaya dalam meningkat realisasi belanja modalnya dengan tujuan untuk meningkatkan belanja pembangunan infrastruktur. Tabel 1 memberikan perkembangan belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode Tahun 2015-2017.

Tabel 1. Belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2015		2016		2017	
	Jumlah	% Pert.	Jumlah	% Pert.	Jumlah	% Pert.
Kerinci	177.166	-12,07	198.791	12,21	202.265	1,75
Merangin	291.298	19,87	340.726	16,97	352.271	3,39
Sarolangun	284.426	24,42	233.984	-17,73	264.329	12,97
Batang Hari	156.606	-35,19	172.177	9,94	191.926	11,47
Muaro Jambi	302.531	-10,05	268.531	-11,24	294.187	9,55
Tanjung Jabung Timur	279.110	5,95	365.777	31,05	370.264	1,23
Tanjung Jabung Barat	268.787	-35,9	225.111	-16,25	272.988	21,27
Tebo	245.745	16,99	233.969	-4,79	266.388	13,86
Bungo	212.027	8,63	110.596	-47,84	183.642	66,05
Kota Jambi	358.128	20,95	424.195	18,45	475.221	12,03
Kota Sungai Penuh	179.939	-16,65	212.004	17,82	237.614	12,08

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi cenderung mengalami perkembangan yang berfluktuasi selama periode 2015-2017. Besar kecilnya realisasi

belanja modal diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Hasil penelitian Nuarisa (2013) menemukan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian Nobianto dan Hanafiah (2015) di Kalimantan Barat menemukan bahwa PAD, DAU, DAK, DBH, dan tingkat efektifitas keuangan daerah tahun sebelumnya mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. Wulan (2017) juga menemukan bahwa) bahwa sumber pendapatan daerah yaitu PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU Dan DAK terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel periode Tahun 2011 – 2017, yang mencakup belanja modal, PAD, DAU dan DAK kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Data bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Analisis data awal dilakukan secara deskriptif. Selanjutnya untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi digunakan model regresi data panel metode random effect dengan persamaan sebagai berikut:

$$BM_{it} = \alpha + \alpha_1 PAD_{it} + \alpha_2 DAU_{it} + \alpha_3 DAK_{it} + e_{it}$$

Dimana:

BM_{it} = Belanja Modal

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU_{it} = Dana Alokasi Umum (DAU)

DAK_{it} = Dana Alokasi Khusus (DAK)

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Koefisien masing-masing variabel

α_0 = Konstanta

e = Kesalahan pengganggu (stokastik)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perkembangan PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode Tahun 2011 – 2017 diberikan pada Tabel 2.

Rata-rata perkembangan realisasi PAD terendah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu hanya sebesar 11,17 persen. Rendahnya rata-rata perkembangan realisasi PAD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikarenakan masih banyak potensi pajak yang belum tergali dan pemungutan pajak dan retribusi masih belum optimal.

Rata-rata realisasi PAD terkecil di Provinsi Jambi terjadi pada Kota Sungai Penuh yaitu hanya 30.761 Juta Rupiah pertahunnya. Kecilnya realisasi PAD yang diterima disebabkan beberapa faktor yaitu daerah ini merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kerinci sejak tahun 2009, sehingga aset dan potensi pajak serta retribusi saat ini tidak besar dan belum optimal. Hal ini disebabkan adanya permasalahan

kepemilikan aset daerah yang belum terselesaikan antara Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2011-2017

Kabupaten/Kota	PAD (Rp. Juta)							Rata-Rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kerinci	34.939	32.017	36.445	55.551	58.824	80.850	75.214	53.406
Perkembangan (%)		-8,36	13,83	52,42	5,89	37,44	-6,97	15,71
Merangin	39.648	30.113	44.396	67.200	76.949	75.158	79.233	58.957
Perkembangan (%)		-24,05	47,43	51,36	14,51	-2,33	5,42	15,39
Sarolangun	31.606	28.008	31.308	60.959	71.429	92.425	87.366	57.586
Perkembangan (%)		-11,38	11,78	94,71	17,18	29,39	-5,47	22,70
Batang Hari	35.729	37.230	42.261	70.809	78.554	73.516	76.842	59.277
Perkembangan (%)		4,20	13,51	67,55	10,94	-6,41	4,52	15,72
Muaro Jambi	28.222	43.561	48.531	61.631	64.901	60.630	63.212	52.955
Perkembangan (%)		54,35	11,41	26,99	5,31	-6,58	4,26	15,96
Tanjung Jabung Timur	24.649	29.436	29.812	31.462	35.124	43.935	45.722	34.306
Perkembangan (%)		19,42	1,28	5,53	11,64	25,09	4,07	11,17
Tanjung Jabung Barat	40.606	44.633	54.642	75.796	83.037	85.934	92.648	68.185
Perkembangan (%)		9,92	22,43	38,71	9,55	3,49	7,81	15,32
Tebo	19.538	26.939	34.331	56.846	62.006	60.938	65.741	46.620
Perkembangan (%)		37,88	27,44	65,58	9,08	-1,72	7,88	24,36
Bungo	60.708	64.281	107.020	113.173	126.014	114.818	135.020	103.005
Perkembangan (%)		5,89	66,49	5,75	11,35	-8,88	17,59	16,36
Kota Jambi	99.000	113.090	149.042	246.428	264.068	287.525	294.269	207.632
Perkembangan (%)		14,23	31,79	65,34	7,16	8,88	2,35	21,63
Kota Sungai Penuh	14.356	19.706	24.267	33.200	44.271	36.632	42.896	30.761
Perkembangan (%)		37,27	23,15	36,81	33,35	-17,26	17,10	21,74

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018

Perkembangan DAU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

Perkembangan DAU kabupaten/kota di Provinsi Jambi diberikan pada Tabel 3. Rata-rata perkembangan realisasi DAU terendah yaitu terjadi di Kabupaten Bungo yaitu hanya sebesar 11,17 persen. Rendahnya realisasi DAU di Kabupaten Bungo disebabkan pada tahun 2017 realisasi DAU Kabupaten Bungo mengalami penurunan sebesar -5,58 persen sementara beberapa daerah lainnya mengalami peningkatan. Walaupun kabupaten Sarolangun dan Kota Jambi juga mengalami penurunan, tetapi penurunannya relatif kecil yaitu hanya sekitar 4 persen.

Rata-rata perkembangan realisasi DAU tertinggi terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 15,52 persen. Tingginya perkembangan DAU tersebut dikarenakan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai kemampuan PAD yang rendah untuk membiayai belanja daerahnya, sehingga dalam 7 tahun terakhir pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibantu oleh dana transfer dari pusat dalam bentuk DAU.

Selanjutnya rata-rata realisasi DAU terbesar terjadi di Kota Jambi dengan rata-rata sebesar Rp. 610.396 Juta Rupiah pertahun dan yang terkecil pada Kota Sungai Penuh yaitu sebesar Rp 362.851 Juta Rupiah. Kecilnya realisasi DAU yang diterima Kota Sungai Penuh disebabkan kecilnya jumlah penduduk, sempitnya luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat miskin yang tergolong rendah.

Tabel 3. Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) di kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2011-2017

Kabupaten/Kota	DAU (Rp. Juta)							Rata-Rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kerinci	369.051	442.628	501.185	545.366	459.036	594.747	630.458	506.067
Perkembangan (%)		19,94	13,23	8,82	-15,83	29,56	6,00	10,29
Merangin	416.126	509.654	565.161	633.658	535.009	729.326	823.643	601.797
Perkembangan (%)		22,48	10,89	12,12	-15,57	36,32	12,93	13,20
Sarolangun	352.956	419.841	472.596	513.112	610.982	587.491	564.000	502.997
Perkembangan (%)		18,95	12,57	8,57	19,07	-3,84	-4,00	8,55
Batang Hari	344.798	427.893	507.478	527.233	431.649	610.908	690.167	505.732
Perkembangan (%)		24,10	18,60	3,89	-18,13	41,53	12,97	13,83
Muaro Jambi	370.991	458.269	543.499	565.257	552.316	681.513	710.710	554.651
Perkembangan (%)		23,53	18,60	4,00	-2,29	23,39	4,28	11,92
Tanjung Jabung Timur	281.538	356.323	430.383	431.558	360.081	533.829	607.577	428.756
Perkembangan (%)		26,56	20,78	0,27	-16,56	48,25	13,81	15,52
Tanjung Jabung Barat	279.360	329.459	387.992	429.955	467.846	507.980	548.114	421.529
Perkembangan (%)		17,93	17,77	10,82	8,81	8,58	7,90	11,97
Tebo	350.969	410.846	461.007	509.397	422.627	586.979	651.331	484.737
Perkembangan (%)		17,06	12,21	10,50	-17,03	38,89	10,96	12,10
Bungo	379.219	456.372	523.680	579.601	577.408	641.635	605.862	537.682
Perkembangan (%)		20,35	14,75	10,68	-0,38	11,12	-5,58	8,49
Kota Jambi	441.549	543.578	626.332	678.620	556.834	727.564	698.294	610.396
Perkembangan (%)		23,11	15,22	8,35	-17,95	30,66	-4,02	9,23
Kota Sungai Penuh	257.556	295.529	344.518	365.298	308.427	425.686	542.945	362.851
Perkembangan (%)		14,74	16,58	6,03	-15,57	38,02	27,55	14,56

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018

Perkembangan DAK kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Perkembangan DAK kabupaten/kota di Provinsi Jambi diberikan pada Tabel 4. Rata-rata perkembangan realisasi DAK terendah terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu hanya sebesar 7 persen. Rendahnya rata-rata perkembangan realisasi DAK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikarenakan sedikitnya program kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat sehingga tidak terjadi peningkatan realisasi yang signifikan setiap tahunnya.

Rata-rata perkembangan realisasi DAK tertinggi terjadi di Kota Jambi yaitu sebesar 87,66 persen. Tingginya perkembangan DAK tersebut dikarenakan banyaknya program kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat di Kota Jambi yang terdapat dalam Renstra Kota Jambi, sehingga terjadi peningkatan realisasi yang signifikan setiap tahunnya.

Rata-rata realisasi DAK terbesar juga terjadi di Kota Jambi yaitu sebesar Rp. 130.880 Juta Rupiah pertahunnya. Sebaliknya realisasi DAK terendah terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yaitu hanya 47.283 Juta Rupiah pertahunnya. Kecilnya realisasi DAK yang diterima disebabkan tidak banyak kegiatan atau program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 4 Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2011-2017

Kabupaten/Kota	DAK (Rp. Juta)							Rata-Rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kerinci	48.915	56.524	60.810	50.486	33.770	143.231	252.692	92.347
Perkembangan (%)		15,56	7,58	-16,98	-33,11	324,14	76,42	62,27
Merangin	46.346	46.655	51.815	49.332	91.749	242.225	292.701	117.260
Perkembangan (%)		0,67	11,06	-4,79	85,98	164,01	20,84	46,29
Sarolangun	42.168	51.689	45.968	47.316	56.721	97.850	138.979	68.670
Perkembangan (%)		22,58	-11,07	2,93	19,88	72,51	42,03	24,81
Batang Hari	31.426	32.011	49.684	28.209	60.463	118.803	127.143	63.963
Perkembangan (%)		1,86	55,21	-43,22	114,34	96,49	7,02	38,62
Muaro Jambi	44.520	57.738	53.326	48.930	60.456	25.489	40.522	47.283
Perkembangan (%)		29,69	-7,64	-8,24	23,56	-57,84	58,98	6,42
Tanjung Jabung Timur	48.326	53.751	58.069	49.248	60.769	65.349	69.929	57.920
Perkembangan (%)		11,23	8,03	-15,19	23,39	7,54	7,01	7,00
Tanjung Jabung Barat	46.145	52.484	53.549	52.451	57.247	111.078	164.909	76.838
Perkembangan (%)		13,74	2,03	-2,05	9,14	94,03	48,46	27,56
Tebo	42.575	34.162	41.950	50.680	58.287	141.631	164.975	76.323
Perkembangan (%)		-19,76	22,80	20,81	15,01	142,99	16,48	33,05
Bungo	48.636	40.226	54.328	61.139	93.745	150.318	206.891	93.612
Perkembangan (%)		-17,29	35,06	12,54	53,33	60,35	37,64	30,27
Kota Jambi	34.673	40.010	48.535	50.248	61.206	347.564	333.922	130.880
Perkembangan (%)		15,39	21,31	3,53	21,81	467,86	-3,93	87,66
Kota Sungai Penuh	50.547	18.750	27.504	27.039	22.121	119.076	216.031	68.724
Perkembangan (%)		-62,91	46,69	-1,69	-18,19	438,29	81,42	80,60

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018

Perkembangan belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Perkembangan belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi diberikan pada Tabel 5. Rata-rata perkembangan realisasi belanja modal terendah terjadi di Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 3,03 persen. Selanjutnya rata-rata realisasi belanja modal terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan rata-rata sebesar 319.562 juta rupiah.

Tabel 5. Perkembangan belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2011-2017

Kabupaten/Kota	Belanja Modal (Rp. Juta)							Rata-Rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kerinci	172.406	191.926	199.891	201.495	177.166	198.791	202.265	191.991
Perkembangan (%)		11,32	4,15	0,80	-12,07	12,21	1,75	3,03
Merangin	87.249	139.564	212.060	243.002	291.298	340.726	352.271	238.024
Perkembangan (%)		59,96	51,94	14,59	19,87	16,97	3,39	27,79
Sarolangun	185.875	219.506	199.497	228.609	284.426	233.984	264.329	230.889
Perkembangan (%)		18,09	-9,12	14,59	24,42	-17,73	12,97	7,20
Batang Hari	106.153	215.647	255.738	241.655	156.606	172.177	191.926	191.415
Perkembangan (%)		103,15	18,59	-5,51	-35,19	9,94	11,47	17,08
Muaro Jambi	162.508	156.867	427.129	336.338	302.531	268.531	294.187	278.299
Perkembangan (%)		-3,47	172,29	-21,26	-10,05	-11,24	9,55	22,64
Tanjung Jabung Timur	276.884	317.231	364.232	263.434	279.110	365.777	370.264	319.562
Perkembangan (%)		14,57	14,82	-27,67	5,95	31,05	1,23	6,66
Tanjung Jabung Barat	235.860	271.851	457.745	419.351	268.787	225.111	272.988	307.385
Perkembangan (%)		15,26	68,38	-8,39	-35,90	-16,25	21,27	7,39
Tebo	162.092	248.437	271.774	210.060	245.745	233.969	266.388	234.066
Perkembangan (%)		53,27	9,39	-22,71	16,99	-4,79	13,86	11,00
Bungo	118.713	103.057	246.895	195.187	212.027	110.596	183.642	167.160
Perkembangan (%)		-13,19	139,57	-20,94	8,63	-47,84	66,05	22,05
Kota Jambi	150.863	157.252	272.772	296.097	358.128	424.195	475.221	304.933
Perkembangan (%)		4,23	73,46	8,55	20,95	18,45	12,03	22,95
Kota Sungai Penuh	141.593	146.504	192.981	215.887	179.939	212.004	237.614	189.503
Perkembangan (%)		3,47	31,72	11,87	-16,65	17,82	12,08	10,05

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018

Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Hasil estimasi persamaan data panel pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal diberikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil estimasi *Random Effects Model* (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	105.2951	42.76611	2.462116	0.0162
PAD?	-0.000500	0.001071	-0.466448	0.6423
DAU?	0.236871	0.088015	2.691254	0.0088
DAK?	0.217743	0.135121	1.611466	0.1114
Random Effects (Cross)				
_KERINCI—C	-46.42369			
_MERANGIN--C	-30.78981			
_SAROLANGUN--C	-7.387380			
_BATANGHARI--C	-38.83985			
_MUAROJAMBI--C	30.03880			
_TANJABTIM--C	87.26583			
_TANJABBAR--C	74.56759			
_TEBO—C	-2.305014			
_BUGO—C	-74.81541			
_JAMBI—C	23.23714			
_SUNGAIPENUH--C	-14.54819			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			59.52441	0.4925
Idiosyncratic random			60.42427	0.5075
Weighted Statistics				
R-squared	0.271803	Mean dependent var		86.40276
Adjusted R-squared	0.241877	S.D. dependent var		68.53139
S.E. of regression	59.67044	Sum squared resid		259921.0
F-statistic	9.082546	Durbin-Watson stat		1.172618
Prob(F-statistic)	0.000035			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.137422	Mean dependent var		241.2024
Sum squared resid	461473.8	Durbin-Watson stat		0.660466

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 6 diketahui nilai Prob F Statistik $0,000035 < 0,05$, maka berarti H_0 ditolak dan menerima H_a . Dengan demikian secara bersama sama (simultan) PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Untuk menguji signifikansi pengaruh, PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi secara parsial maka digunakan uji t statistik. Hasil uji t statistik sebagai berikut:

1. Nilai t hitung variabel PAD yaitu -0,4664, dengan *probabilita* sebesar 0,6423. Karena $Prob > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi

Jambi. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Sugiarti dan Supadmi (2014) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Tidak berpengaruhnya PAD terhadap belanja modal dikarenakan jika dilihat secara keseluruhan PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih kecil kontribusinya terhadap belanja modal. Sehingga pertumbuhan PAD tidak mempengaruhi belanja modal.

2. Nilai t hitung variabel DAU yaitu 2,6912 dengan *probabilita* sebesar 0,0088. Karena $Prob < 0,05$, maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nuarisa (2013) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berpengaruhnya variabel DAU terhadap penerimaan pajak dikarenakan angka DAU yang sangat besar sehingga berkontribusi besar terhadap pengalokasian belanja modal secara keseluruhan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
3. Nilai t hitung variable DAK yaitu 1,6114, dengan *probabilita* sebesar 0,1114. Karena $Prob > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Nuarisa (2013) menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Tidak berpengaruhnya DAK terhadap belanja modal dikarenakan kecilnya kontribusi DAK terhadap belanja modal secara keseluruhan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama Tahun 2011-2017 cenderung mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Meskipun demikian, secara parsial hanya DAU yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sementara PAD dan DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Saran

Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota hendaknya lebih memaksimalkan Dana alokasi umum untuk dialokasikan ke belanja modal, seperti membiayai kegiatan-kegiatan yang berbasis pada peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur.

Selain itu, penelitian ini juga menyarankan untuk peneliti selanjutnya, agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, untuk menggunakan rentang waktu yang lebih panjang serta menambah variabel-variabel terkait lainnya secara teori.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran

- Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arwati, D., & Novita H. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Prosiding*. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013). 498-507.
- Basri, H.; Delis, A; Junaidi, J. (2014). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81-90
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63-70.
- Juanda, B., & Junaidi. (2012). *Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press.
- Bratakusumah, D.S., (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanto F.P.D., (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal (Studi kasus pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2013). *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Gujarati, D.N., & Porter, D.C. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A.. (2007), *Akuntansi Keuangan Daerah (Buku edisi Ketiga)*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Kuncoro, M., (2004), *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga.
- Kusnandar, D.S., (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi*. Vol. 15
- Liliana. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Investasi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(3), 163-181.
- Mardiasmo, (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 80-90.
- Moh. Nasir. (2001). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Irsyadi, M.A. (2014). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nobianto, R., & Hanafiah, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Skripsi*. Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon.

Nuarisa, Ardhian Sheila. (2013). *Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Accounting Analysis Journal Vol. 2, No.1 Universitas Negeri Semarang.